

MASYARAKAT TANI MASA DEPAN: PERBENTURAN BUDAYA LOKAL DAN GLOBAL

The Peasant Community in the Future: A Clash of Local and Global Cultures

Darmawan Salman, Sitti Bulkis dan Arifin Sallatang

Jurusan Sosial-Ekonomi Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar

ABSTRACT

A number of external and internal phenomena indicate that how weak the position of our agriculture in facing the globalization. In the same time, wick far away the extent of the paesant's local culture can be stood on the clash of capitalism global culture, becoming a question. In this respect, there are two forms of cultural clash that can be occurred, those are "cultural hybridization" and "cultural underdevelopment". Ideally, the peasant community in the future is a result of the "cultural hybridization", a marriage between native local culture element and outside global culture element, so that it is going on a so called glocalization. This direction will be attained when the peasant has a powerness social-economically, because by the social-economically powerness it is the local cultural element possesses a power or strength to "marry" with the global culture.

Keywords: peasant community, local and global cultures, cultural hybridization.

PENDAHULUAN : MENIMBANG BERBAGAI FENOMENA

Salah satu loncatan besar peradaban manusia saat ini adalah diterimanya globalisasi sebagai kerangka perkembangan peradaban. Seakan tercipta kesepakatan mondial bahwa pasar bebas adalah wahana paling menjanjikan untuk terciptanya kemakmuran manusia. Dengan itu, hubungan manusia-modal-teknologi-informasi beserta berbagai unsur terkait dibebaskan bergerak tanpa dihambat lagi oleh sekat-sekat negara, mereka terbebaskan bergerak sesuai kehendak mekanisme pasar.

Terkait dengan Indonesia, kerangka perdagangan bebas skala Asia Tenggara (AFTA) telah disepakati akan dimulai pada tahun 2003. Untuk skala ini, secara tidak terhindarkan, Indonesia harus bersiap terjun untuk kompetisi bebas bersama negara-negara serumpun. Pada tahun 2010, mulai berlaku perdagangan bebas bagi perekonomian di kawasan Asia Pasifik, dan tahun 2020 mulai berlaku perdagangan bebas dalam kerangka GATT/WTO. Tidak terelakkan, bidang pertanian telah masuk ke dalam agenda perdagangan bebas tersebut. Pertanyaan kita, sejauhmana bidang pertanian sudah siap memasuki era kompetisi bebas dalam kerangka globalisasi tersebut? Hal ini penting

ditelusuri karena adanya fenomena-fenomena menarik yang kita hadapi baik secara eksternal maupun internal.

Secara eksternal, terdapat fenomena semakin nyata pengaruh pasar internasional terhadap tuntutan produksi pertanian, terutama dari segi kualitas secara agronomis, higienis secara kesehatan, keamanan secara ekologis, dan pencapaian standar mutu secara manajerial. Selain itu, juga terdapat fenomena bahwa perdagangan produk-produk pertanian melibatkan interaksi intensif antara pasar lokal dan pasar global, dalam arti di satu sisi produk pertanian global semakin memasuki pasar lokal, di sisi lain produk pertanian lokal dituntut memasuki pasar perdagangan dunia.

Secara internal, terdapat fenomena betapa tertinggalnya produksi pertanian kita saat ini. Dibanding dua negara berpenduduk besar lainnya di Asia, yakni RRC dan India, data FAO tahun 2000 menunjukkan bahwa hampir pada semua jenis komoditas andalan kita tertinggal. Produksi padi RRC dan India pada tahun 2000 masing-masing 191,1 juta ton dan 134 juta ton, sementara Indonesia hanya 51 juta ton. Untuk komoditas jagung, RRC dan India masing-masing mencapai 105,2 juta ton dan 11,5 juta ton, sementara Indonesia hanya 9,1 juta ton. Keteringgalan juga terlihat pada komoditas lainnya. Seperti ditulis Bey (2001), ketika produksi kedelai RRC dan India mencapai 15,4 juta ton dan 5,5 juta ton, produksi kedelai Indonesia hanya 1,1 juta ton. Kalau RRC dan India mampu memproduksi tebu masing-masing 70,2 juta ton dan 315 juta ton, maka petani kita hanya mampu memproduksi sebanyak 21,4 juta ton. Jika RRC dan India memproduksi mangga masing-masing 3,3 juta ton dan 25,8 juta ton, produksi mangga Indonesia hanya sebesar 827.000 ton. Untuk komoditas teh, RRC dan India masing-masing memproduksi 721.000 ton dan 749.000 ton, sementara Indonesia hanya sebesar 167,9 ton.

Perbandingan seperti di atas memang tidak sepenuhnya *fair*, mengingat adanya perbedaan jumlah penduduk, luas wilayah dan kondisi geografis-klimatologis. Namun realitas domestik kita memang juga menunjukkan bahwa produksi pertanian kita tidak mencukupi kebutuhan dan kualitasnya juga rendah. Selain itu, dari segi kesejahteraan pelaku produksi, realitas menunjukkan bahwa kesejahteraan petani Indonesia semakin menurun sejak awal 1990-an. Data NTP (Nilai Tukar Petani) menunjukkan bahwa pada tahun 2000 hampir pada semua provinsi, NTP petani di bawah 100. Ini berarti bahwa dibanding pelaku ekonomi lain, nilai tukar petani semakin tertinggal dan berdampak pula pada tertinggalnya kesejahteraan. Indikasi lain, laporan Bank Dunia (2001) menyebutkan bahwa 60% penduduk Indonesia tergolong miskin, dalam arti pendapatannya dibawah 2 \$ AS/hari. Siapapun tahu, porsi terbesar dari penduduk miskin tersebut adalah petani.

Dengan demikian permasalahannya adalah, di sisi eksternal ada tuntutan untuk menarik petani ke persaingan global yang ketat, tetapi di sisi lain ada

realitas ketertinggalan petani yang sangat nyata. Dalam kondisi demikian kemudian muncul agenda budaya, dalam arti, sejauh mana masyarakat tani dapat bertahan secara kultural di tengah pergumulan dengan budaya global, sebagai efek dari keterintegrasiannya dengan perdagangan dunia atau pasar global.

PERBENTURAN BUDAYA DALAM GLOBALISASI : HIBRIDISASI ATAU KETER-TINGGALAN ?

Kerangka teoretis tentang pergumulan budaya yang terjadi dalam proses globalisasi, dapat dibagi dalam dua teori utama. Pertama, teori "hibridisasi budaya", terutama dipelopori oleh Piterse (1995), menyatakan bahwa dengan globalisasi ekonomi dan pengaruh teknologi informasi, pergumulan antara budaya lokal dengan budaya global akan mengambil bentuk hibridisasi. Ini berarti akan terjadi "perkawinan" antara unsur-unsur budaya lokal dengan unsur-unsur budaya global sedemikian rupa sehingga tercipta sebuah budaya baru yang merupakan hibridisasi budaya. Budaya baru hasil hibridisasi ini disebut oleh Robertson (1995) sebagai budaya glocal (gabungan unsur global dan lokal) dan proses pergumulan budaya yang terjadi disebut sebagai proses glocalisasi.

Kedua, teori "ketertinggalan budaya", terutama dikonseptualisasi oleh Dhouadi (1994), bahwa yang terjadi dalam proses globalisasi adalah pembunuhan atas budaya-budaya lokal, proses dimana nilai-nilai Barat mengekspansi ke pelosok-pelosok lokal, lalu warga lokal menerimanya tanpa mempertimbangkan eksistensi budaya lokalnya sendiri. Ini terlihat pada semakin ditinggalkannya nilai dan norma asli dan diganti dengan nilai dan norma kapitalis, digantikannya pengetahuan dan teknologi asli dengan pengetahuan dan teknologi yang berasal dari dunia ilmiah/kampus Barat, serta digesernya bahasa-bahasa lokal oleh bahasa Inggris, Perancis atau Spanyol.

Dihubungkan dengan masyarakat tani di Indonesia, diantara dua teori tersebut, pertanyaan yang kemudian perlu ditelusuri jawabannya adalah: apakah petani dan masyarakat tani kita akan berkembang mengambil jalur hibridisasi budaya atau jalur ketertinggalan budaya? Jalur hibridisasi budaya mengasumsikan bahwa ketahanan budaya masyarakat petani akan cukup kuat menghadapi ekspansi budaya karena globalisasi. Sementara jalur ketertinggalan budaya mengasumsikan bahwa ketahanan budaya masyarakat petani dalam kondisi rentan ketika berhadapan dengan ekspansi budaya yang dibawa globalisasi.

DINAMIKA BUDAYA MASYARAKAT TANI INDONESIA : HIBRIDISASI ATAU KETERINGGALAN ?

Dalam sejarah perkembangan pertanian di Indonesia, ekspansi budaya kapitalis ke dalam budaya lokal tani sebenarnya telah berlangsung sejak budaya perkebunan dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Belanda. Pada zaman itu, komersialisasi ekonomi dan adopsi teknologi ilmiah secara bertahap mengalami intensifikasi di perdesaan. Namun, dalam pada itu, budaya tradisional juga bertahan, sehingga Boeke (1946) menyebut sistem sosial-ekonomi-budaya Indonesia pada saat itu sebagai sistem yang dualistik.

Setelah itu, ketika komersialisasi di perkebunan terus berlangsung, revolusi hijau juga muncul sebagai stimulan baru bagi komersialisasi dan kapitalisasi ekonomi di perdesaan. Wahono (1994), mengilustrasikan lebih jauh fenomena dualisme versi Boeke yang sebelumnya bahwa: *pertama*, pranata ekonomi dan sosial yang dualistik telah terjadi di perdesaan (terutama di Jawa) akibat semakin merajalelanya unsur-unsur sistem ekonomi kapitalis dalam bentuk meningkatnya komersialisasi dan penggunaan teknologi tinggi melalui proses revolusi hijau.

Kedua, bahwa pranata dualistik tersebut telah memisahkan perilaku sosial, di satu pihak petani berlahan luas dengan motivasi pemaksimalan hasil panen padi dan penanaman modal lewat pembelian tanah dan sumberdaya pendidikan anak, dan di lain pihak petani berlahan sempit atau tunakisma dengan motivasi pertahanan hidup dan pengembalian modal pinjaman guna membiayai ongkos produksi dan kebutuhan sosial.

Ketiga, bahwa dengan hadirnya tekanan penduduk atas tanah, dan ekonomi politik makro yang bias ke pemilik modal, maka pranata dualistik yang telah didorong kelahirannya oleh revolusi hijau, dalam praktek, di satu pihak meningkatkan perolehan ekonomis petani berlahan luas, di lain pihak memperkecil perolehan ekonomis petani berlahan sempit atau tunakisma. Dengan demikian, modernisasi pertanian melalui revolusi hijau telah menghasilkan kelompok petani kaya yang semakin kaya (yang umumnya memiliki lahan luas) dan meningkatnya jumlah petani miskin (berlahan sempit/gurem/tunakisma, buruh tani) yang semakin terjepit dan sulit memperbaiki kesejahteraan hidupnya melalui sektor pertanian.

Di balik realitas dualistik yang tercipta, segi perubahan lain juga dapat dilihat. Proses produksi dengan teknologi pertanian modern telah menyebabkan berkurangnya jumlah tenaga manusia untuk mengerjakan lahan dan mendorong sikap komersialisasi petani berlahan luas dengan pertimbangan rasional dan ekonomis. Petani kaya lebih suka mempekerjakan sedikit buruh tani dengan menggunakan traktor misalnya, daripada mempekerjakan banyak

orang, karena akan lebih efisien dan ekonomis. Ini adalah indikasi nyata dari bergesernya orientasi budaya masyarakat tani, dari orientasi kolektivitas ke orientasi individualitas.

Pada aspek lain, sikap komersialisasi petani berlahan luas itu berdampak sangat merugikan petani miskin, karena posisi petani kaya dalam struktur sosial masyarakat perdesaan umumnya menempati status sebagai patron, sedangkan petani miskin sebagai klien. Adanya perubahan sikap ini mendorong pudarnya ikatan-ikatan patron-klien tersebut, yang pada gilirannya menggusur norma-norma subsistensi komunitas yang memberi jaminan kepada warganya untuk aman subsistensi.

Hal ini berarti, dari segi budaya, secara horizontal telah terkikis nilai dan norma yang mengorientasikan tindakan pada pengutamakan harmoni kolektivitas. Budaya tersebut digantikan oleh nilai dan norma yang mengutamakan keunggulan individu, dimana nilai dan norma terakhir merupakan derivasi dari kapitalisme, sementara kapitalisme sendiri adalah anak kandung pertama dari kerangka globalisasi (McMichael, 1995). Secara vertikal, pengikisan ikatan patron-klien telah mengkondisikan tertiadakannya nilai dan norma subsistensi oleh mekanisme komunitas bagi warganya (Scott, 1972). Fungsi mekanisme komunitas digantikan oleh mekanisme pasar, dan pasar, dengan prinsip Darwinisme Sosial, adalah anak kandung kedua dari globalisasi (Evers, 1997).

Apa yang bisa disimpulkan sebagai efek dari komersialisasi dan kapitalisasi melalui usaha perkebunan dan revolusi hijau adalah, bahwa telah tercipta polarisasi masyarakat tani tidak hanya secara ekonomi tetapi juga dalam aspek budaya dan perilaku sosialnya. Ini berarti bahwa di satu pihak budaya yang dihantarkan oleh globalisasi tertanamkan ke dalam sebagian masyarakat tani, tetapi di pihak lain ada juga lapisan masyarakat yang tidak/belum tertanami oleh unsur-unsur dari budaya global tersebut. Apa yang dikonseptualisasi oleh Pieterse (1995) sebagai "hibridisasi budaya" atau oleh Dhouadi (1994) sebagai "ketertinggalan budaya" masih sulit ditemukan fakta empirisnya. Realitas yang tercipta lebih dapat dikonseptualisasi sebagai "polarisasi budaya", realitas dimana di satu sisi keberadaan lapisan masyarakat tani berbudaya kapitalis-modern berhadapan dengan keberadaan lapisan masyarakat tani berbudaya prakapitalis-tradisional pada sisi lainnya. Secara konseptual, realitas empiris seperti ini lebih relevan dengan apa yang disebut Redfield (1955) sebagai polarisasi antara pengusung "*great tradition*" (budaya agung/kapitalisme) dengan pengusung "*little tradition*" (budaya kecil/prakapitalisme).

BUDAYA TANI MASA DEPAN : MENCARI BENTUK ARTIKULASI

Terpolarnya masyarakat secara sosial, ekonomi dan budaya bukanlah *ideal type* sebuah peradaban. *Ideal type* sebuah peradaban adalah terciptanya spektrum kontinum yang semakin menyempit rentangnya antara *great tradition* dengan *little tradition*. Dengan demikian, polarisasi antara *great tradition* dengan *little tradition* adalah bentuk transisi, sebuah bentuk yang akan bergerak ke titik keseimbangan bagi terciptanya *ideal type*.

Hibridisasi budaya yang dikonseptualisasi Pieterse (1995), sebenarnya adalah sebuah bentuk *ideal type*. Proses terkawinkannya unsur-unsur budaya global dengan unsur-unsur budaya lokal merupakan bentuk kongruen dari dinamika peradaban yang digerakkan oleh globalisasi. Ketertinggalan budaya yang dikonseptualisasi Dhouadi (1994) juga merupakan sebuah *ideal type*, bahwa kalau kongruensi tidak tercapai dalam bentuk hibridisasi, maka yang akan terjadi adalah ketertinggalan budaya lokal atas budaya global. Lalu, *ideal type* mana yang akan kita capai?

Tentu saja sebuah peristiwa ketertinggalan budaya tidak diinginkan terjadi di depan mata kita dimana budaya yang tertinggal itu adalah budaya kita sendiri. Agenda moderat yang dapat dipilih adalah hibridisasi budaya, yakni terlahirkannya sebuah budaya baru, yang di dalamnya berkontribusi sejumlah unsur yang dibawa oleh globalisasi dan sejumlah unsur yang berakar secara lokal. Ini yang disebut oleh Robertson (1995) sebagai proses glocalisasi.

Bagaimana glocalisasi berlangsung? Menurut Meillasoux dan Rey (dalam Blomstrom dan Hettne, 1984) serta Hefner (1998), dalam pertemuan antara budaya kapitalisme (global) dengan budaya prakapitalisme (lokal), selalu terbuka peluang artikulasi satu sama lain. Kapitalisme dapat menyesuaikan sebagian unsur-unsurnya dengan budaya lokal, begitu pula variasi budaya lokal yang ada selalu dapat menyesuaikan unsur-unsurnya dengan budaya kapitalisme. Dengan demikian, agar tidak terjadi dominasi/ketertinggalan budaya yang dicemaskan Dhouadi, agenda ke depan yang perlu dipikirkan adalah bagaimana membuat skenario berlangsungnya artikulasi.

Agar artikulasi timbal-balik antara budaya global dan lokal berlangsung, politik kemandirian mulai dari tingkat bangsa sampai tingkat individu menjadi sebuah prasyarat. Menurut Galtung (1982), dalam kondisi sekian lama negara berkembang terikat dalam politik ketergantungan (sosial-ekonomi) kepada negara maju, bagaimana mungkin sebuah perjuangan artikulasi budaya berlangsung, sebelum politik ketergantungan (sosial-ekonomi) itu sendiri diganti dengan politik kemandirian? Ini berarti bahwa *ideal type* dari individu petani, masyarakat tani dan wilayah pertanian yang mestinya dituju pada masa depan adalah individu petani, masyarakat tani dan wilayah pertanian yang memiliki kemandirian dalam menjalin interaksi dengan individu lain, masyarakat lain, dan wilayah lain.

AGENDA OPERASIONAL: PEMBERDAYAAN PETANI

Untuk realitas masyarakat tani Indonesia saat ini, sebuah kondisi kemandirian dapat tercapai hanya dan hanya jika dimulai dengan agenda radikal, yang kemudian dilanjutkan dengan agenda yang lebih moderat. Untuk agenda radikal, dua poin utama perlu didiskusikan serius yakni, perubahan pada struktur pemilikan aset untuk produksi pertanian dan perubahan pada sistem produksi pertanian sendiri.

Untuk poin yang pertama, yakni redistribusi aset untuk produksi pertanian, terkait dengan agenda reformasi agraria, atau lebih tajam lagi agenda *land-reform*. Meskipun dengan melalui perjuangan melelahkan dari segi keputusan politik Sidang Tahunan MPR 2001 sudah membuat ketetapan tentang reformasi agraria, tetapi bukan berarti perjuangan reformasi agraria itu sendiri sudah selesai. Justru perjuangan yang sebenarnya baru akan dimulai, yakni bagaimana mengimplementasikan Tap MPR tentang reformasi agraria dimaksud, agar tercipta struktur pemilikan lahan yang terdistribusi secara adil, yang memberi porsi kepada pihak yang paling berhak menguasai tanah yakni mereka yang memang bekerja sebagai petani.

Poin kedua, menyangkut pilihan atas sistem produksi pertanian. Secara teoretis, tersedia setidaknya tiga alternatif sistem produksi pertanian, yakni pertanian individual rumah tangga (*household farming*), pertanian individual perusahaan (*corporate farming*) dan pertanian kolektif (*collective farming*). Pilihan kita selama ini adalah pertanian individual rumah tangga, khususnya pada pertanian sawah dan kebun. Pertanian individual perusahaan juga diterapkan, tetapi terbatas pada usaha-usaha perkebunan, dengan model inti-plasma. Model yang sama sekali tidak diterapkan adalah pertanian kolektif, sistem pertanian dimana lahan milik individu dikolektivasi pengelolaannya oleh koperasi yang dibentuk oleh individu pemilik. Apabila dengan sistem pertanian individual rumah tangga terbukti bahwa daya saing kita sangat rendah, apakah sudah bukan waktunya untuk berpikir radikal mengubah sistem itu sendiri?

Bila kita tidak berani dengan perubahan radikal, maka yang tersisa adalah agenda-agenda moderat saja. Untuk agenda moderat ini, premis yang perlu dipegang adalah, bahwa seiring dengan semangat otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat, membangun pertanian tidak bisa lagi ditilik dari posisinya sebagai sebuah sektor, melainkan pada posisinya sebagai bagian dari suatu wilayah dan bagian dari suatu masyarakat. Fokus bukan lagi pada bagaimana mendorong produksi secara langsung dan keberdayaan petaninya hanyalah efek samping. Fokus adalah yang seharusnya adalah pemberdayaan petani dan prestasi produksi hanyalah efek samping.

Dengan agenda pemberdayaan, pendekatan partisipatoris menjadi pilihan dalam disain program/proyek pertanian. Hakekat dari pendekatan partisipatoris adalah proses belajar berdasarkan pengalaman (*experience based learning*

process], agar melalui proses itu kapabilitas petani meningkat secara *gradual*, sehingga pada gilirannya mereka menjadi pelaku utama dari agenda perbaikan kehidupannya secara mandiri. Proses belajar dimaksud mencakup perencanaan, implementasi dan evaluasi dari aktivitas-aktivitas untuk perbaikan kehidupan mereka.

Di sini, peranan orang luar (pemerintah, LSM dan siapapun) mencakup dua hal. *Pertama*, penyadaran sosial (*social conscientization*), khususnya dalam kaitan dengan potensi yang mereka miliki untuk bisa mandiri, struktur yang harus diubah untuk mewujudkan kemandirian, dan pentingnya aksi kolektif dalam setiap upaya perjuangan kemandirian dimaksud. Terkait di sini adalah agenda aktualisasi nilai-nilai lokal yang mendukung, misalnya untuk petani Bugis nilai *siri*, nilai *reso* dan nilai *agetengeng* sebagai pendukung kemandirian. Kedua, pengorganisasian petani (*peasantry organizing*), yakni memfasilitasi tumbuhnya organisasi petani sebagai wadah saling belajar bagi mereka, wadah untuk menggalang aksi kolektif, dan wadah untuk merancang dan mengimplementasikan aktivitas perbaikan bagi kehidupan mereka.

Dengan proses partisipatoris demikianlah diharapkan mental dan struktur kemandirian dapat terwujud dan perjuangan untuk artikulasi budaya baru dapat memungkinkan bila secara sosial-ekonomi kemandirian terwujud. Pembunuhan/ketertinggalan budaya akan lebih banyak terjadi pada bangsa-bangsa ataupun lokalitas-lokalitas yang bergantung secara sosial-ekonomi. *Quo Vadis?*

DAFTAR PUSTAKA

- Blomstrom, M dan M.Hettne, 1984. *Development Theory in Transition, The Dependency Theory Debate and Beyond: Third World Responses*. London: Zeed Books Ltd.
- Boeke, J.H., 1946. *Oosterse Economic*. Den Haag: N. Service.
- Dhouadi, Mahmoud, 1994. *Capitalism, Global Humane Development and the Other Underdevelopment*, dalam L. Sinklair(Ed.), *Capitalism and Development*. New York: Routledge.
- Evers, Hans-Dieter, 1997. Globalisasi dan Kebudayaan Ekonomi Pasar, *Prisma* No.5, Juni. Jakarta.
- Galtung, Johan, 1982. The Politics of Self Reliance, dalam H. Munoz (Ed.), *From Dependency to Development: Strategies to Overcome Underdevelopment and Inequality*. Colorado: Westview Press.
- Hefner, R.W., 1998. *Market Cultures: Society and Morality in the New Asian Capitalisms*. Boulder: Westview Press.
- McMichael, Philip., 1995. *Globalization: Myths or Realities*. D+C, No. 8.
- Pieterse, J.N., 1995. *Globalization as Hybridization*, dalam M. Featherstone, S. Lash dan R. Robertson (Eds.), *Global Modernities*. London: Sage.

- Redfield, Robert, 1955. *The Little Community*. Chicago: University of Chicago Press.
- Robertson, Roland, 1995. Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity, dalam M. Featherstone, S. Lash dan R. Robertson (Eds.), *Global Modernities*. London: Sage.
- Scott, James C., 1972. The Erosion of Patron-Client Bonds and Social Change in Rural Southeast Asia. *Journal of Asian Studies*, No 33(1).
- Wahono, Fancis, 1994. Dinamika Ekonomi-Sosial Desa Sesudah 25 Tahun Revolusi Hijau, *Prisma* No.3, Maret. Jakarta.